

## QUO VADIS PERGURUAN TINGGI INDONESIA?<sup>1</sup>

Oleh: Hendra Gunawan\*

Dalam buku *“The Great American University”* (New York, 2009), J.R. Cole mengemukakan delapan faktor utama yang menopang kesuksesan perguruan tinggi di Amerika Serikat, yakni: (1) kombinasi pengajaran dan penelitian, (2) otonomi dan kebebasan mimbar, (3) meritokrasi dan sistem kepegawaian (*tenure system*), (4) sistem *peer-review*, (5) kompetisi, (6) influks bakat dari seluruh dunia, (7) *philantrophy*, dan (8) pendanaan Pemerintah. Menarik untuk dianalisis kondisi perguruan tinggi di Indonesia dalam delapan dimensi ini.

Saat ini, terdapat lebih dari 3000 perguruan tinggi di Indonesia, namun sebagian besar (diperkirakan lebih dari 95%) masih terfokus pada pengajaran. Namun ini tidak berarti bahwa pengajaran di perguruan tinggi kita sukses. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi kita diperkirakan masih berada di bawah 20% (sebagai pembandingan, pada tahun 2007, APK perguruan tinggi Malaysia 32.5%, Thailand 42.7% dan Korea Selatan 91.0%). Namun, rendahnya APK perguruan tinggi masih dihiasi pula dengan berita banyaknya sarjana yang menganggur.

Sementara itu, di era reformasi ini, otonomi perguruan tinggi tetap merupakan kemewahan. Campur tangan Pemerintah masih terlalu banyak --- dalam berbagai aspek. Tengoklah misalnya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 yang telah diundangkan, menyusul pembatalan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 (tentang Badan Hukum Pendidikan) oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir Maret 2010. Demikian pula terbitnya Perpres No. 43 dan 44 Tahun 2012, yang menetapkan UPI dan ITB sebagai perguruan tinggi “yang diselenggarakan oleh Pemerintah”, pada saat RUU Pendidikan Tinggi sedang disusun.

Sistem kepegawaian di perguruan tinggi pun masih mencari bentuk. Cobalah hitung berapa banyak perguruan tinggi yang pernah memasang iklan lowongan dosen di media massa. Profesi dosen di Indonesia saat ini masih merupakan profesi “bisik-bisik”. Sistem *peer-review* juga belum terbentuk. Tiap dosen sibuk dengan urusannya sendiri. Hanya mereka yang memang ditugaskan lah yang sesekali menilai sejawatnya, dengan instrumen yang rapuh dan kadar *ewuh pakewuh* yang tinggi. Kompetisi hanya terjadi untuk memperebutkan proyek dan jabatan struktural. Barangkali hanya di Indonesia pemilihan Rektor dan Dekan disertai dengan hiruk-pikuk tim sukses, kampanye dan pemilu, seperti pemilihan Bupati saja.

Juga dapat dihitung dengan jari banyaknya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki mahasiswa asing. Bahkan urusan ijin tinggal untuk mahasiswa asing pun belum dipikirkan dengan baik oleh Pemerintah, kecuali pada Juni 2010 ada surat dari Dirjen Imigrasi kepada Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengenai ijin tinggal terbatas bagi mahasiswa asing, yang lebih luwes dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, bagaimana prakteknya di lapangan, masih perlu ditelusuri.

Bila *philantrophy* masih merupakan makhluk langka di negara kita, bagaimana dengan pendanaan dari Pemerintah? Disamping pendanaan rutin (untuk gaji pegawai dan biaya operasional), tengoklah besarnya dana litbang di negara kita dari tahun ke tahun, yang masih berkutat di bawah 0,1% dari GDP. Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga kita menyediakan dana litbang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Menurut catatan Ristek (2009), dana litbang Singapura pada tahun 2006 adalah

sekitar 2,36% dari GDP-nya, Malaysia 0,63%, Thailand 0,25%, dan Indonesia 0,06%.

### **Produktivitas Penelitian**

Kecilnya dana litbang berkorelasi positif dengan rendahnya output penelitian perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia. Per 8 Februari 2012, jumlah publikasi yang dihasilkan oleh peneliti dari seluruh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia yang tercatat di pangkalan data Scimago (<http://www.scimagojr.com>), yang datanya berasal dari Scopus (<http://www.scopus.com>), hanya 13.047 artikel, sementara Singapura 109.346 artikel, Thailand 59.332 artikel, dan Malaysia 55.211 artikel. (Sebagai catatan, Scopus dipakai sebagai acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi skala dunia.)

Mencoba mempelajari lebih jauh seperti apa produktivitas penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia dan ketiga negara tetangga di atas, penulis mendapatkan data yang menarik dan perlu untuk kita cermati bersama. Data pertama adalah daftar nama 5 (lima) institusi penyumbang publikasi terbanyak di Indonesia dan ketiga negara tetangga tersebut, beserta jumlah publikasi yang tercatat di Scopus per 8 Februari 2012, sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini.

No.	Singapura	Thailand	Malaysia	Indonesia
1	National University of Singapore (64.991)	Mahidol University (17.414)	University of Malaya (16.027)	Institut Teknologi Bandung (2.029)
2	Nanyang Technological University (36.811)	Chulalongkorn University (13.905)	Universiti Sains Malaysia (12.163)	Universitas Indonesia (1.921)
3	Singapore General Hospital (5.999)	Chiang Mai University (6.985)	Universiti Putra Malaysia (11.456)	Universitas Gadjah Mada (1.193)
4	Institute for Infocomm Research (5.206)	Prince of Songkla University (4.703)	Universiti Kebangsaan Malaysia (9.833)	Institut Pertanian Bogor (783)
5	National University Hospital (5.142)	Kasetsart University (4.522)	Universiti Teknologi Malaysia (5.933)	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (731)

Empat kontributor pertama dari Indonesia adalah perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), yang saat ini statusnya sedang dalam masa transisi kembali menuju perguruan tinggi “yang diselenggarakan oleh Pemerintah” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 (bahkan ITB sudah dinyatakan bukan lagi BHMN, sebagaimana disebutkan di atas). Perhatikan bahwa produktivitas perguruan tinggi unggulan kita jauh tertinggal dari perguruan tinggi di Malaysia dan Thailand, apalagi dibandingkan dengan perguruan tinggi di Singapura. Sebagai contoh, Universiti Kebangsaan Malaysia, yang pada tahun 1970-an dibantu oleh sejumlah dosen Institut Teknologi Bandung, saat ini telah menghasilkan publikasi lebih dari empat kali lipat publikasi Institut Teknologi Bandung. Bahkan, bila kita lihat pula tabel di atas, jumlah publikasi total Indonesia ternyata lebih rendah daripada jumlah publikasi *sebuah* University of Malaya saja.

Negara tetangga yang produktivitas penelitiannya kurang lebih seperti Indonesia adalah Filipina. Daftar 5 (lima) institusi penyumbang publikasi terbanyak di Filipina adalah International Rice Research Institute (2.692), University of the Philippines Diliman (1.808), University of the Philippines Los Banos (1.241), University of the Philippines Manila (1.100), dan De La Salle University (721).

### ***Apa Selanjutnya***

Data di atas memang sangat menyedihkan, dan rupanya telah membuat gerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Namun, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan untuk memperbaiki situasi di atas. Mewajibkan mahasiswa S1, di samping mahasiswa S2 dan S3, menulis dan mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal merupakan solusi yang tergesa-gesa dan agak memaksakan. Lebih tepat bila dosen yang dituntut untuk itu. Namun untuk itupun diperlukan dukungan yang memadai, baik dana maupun fasilitas.

Sebagai salah satu pilar penting dari *the Triple Helix*, perguruan tinggi (dan lembaga-lembaga penelitian) memang mesti berbenah untuk berkontribusi pada pembangunan. Perguruan tinggi yang berkualitas tidak hanya menghasilkan sarjana yang cerdas dan berdaya saing tetapi harus juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa melalui pengetahuan dan budaya yang dikembangkannya. Di pihak lain, Pemerintah dan dunia industri tentunya perlu disadarkan untuk mendukung dalam hal kebijakan dan pendanaan. UUD 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, menuju bangsa yang makmur dan sejahtera.

Sistem kepegawaian dan promosi dosen di perguruan tinggi juga perlu dibenahi, misalnya dengan menerapkan sistem berbasis merit. Jadi bukan karena ingin naik pangkat maka seorang dosen melaksanakan penelitian, tapi karena ia banyak menghasilkan publikasi maka pangkatnya dinaikkan. Terkait dengan sistem promosi, remunerasi dosen tentu harus menjadi perhatian pula. Adanya tunjangan kehormatan bagi para Guru Besar PNS merupakan angin baik, namun yang lebih dinantikan adalah gaji pokok yang memadai untuk seluruh dosen, bukan hanya Guru Besar.

Yang juga tak kalah pentingnya adalah tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi, yang berkaitan erat dengan model masyarakat dan budaya akademik seperti apa yang ingin dibangun. Apakah setelah pembatalan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 oleh Mahkamah Konstitusi, dan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 oleh Pemerintah --- yang antara lain mengatur tata kelola perguruan tinggi pasca pembatalan UU No. 9/2009, perguruan tinggi semakin bingung, hanya menunggu RUU Pendidikan Tinggi diundangkan, atau justru menyadari pentingnya otonomi perguruan tinggi untuk berbenah dan menentukan arah ke depan, sambil mengingat kembali misi sejatinya dan menyadarkan Pemerintah apabila mereka melenceng dari amanat UUD 1945.

<sup>1</sup>Tulisan ini terbit di buku "Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan", Sulistyowati Irianto (ed.), Penerbit Obor, 2012, sebelum UU No. 12 Tahun 2012 diundangkan.

\*Guru Besar pada FMIPA ITB Bandung